

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian merupakan salah satu faktor penentu berkembangnya suatu negara. Manakala perekonomian suatu negara berkembang dengan baik, maka dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi masyarakatnya yang meningkat. Dewasa ini pertumbuhan perekonomian di Indonesia didukung oleh dua sektor, yaitu dari perusahaan besar dan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari kedua sektor tersebut 99% perekonomian Indonesia berasal dari UMKM, sedangkan 1% berasal dari perusahaan besar, hal tersebut terbukti pada tahun 2012 dimana perekonomian Indonesia meningkat sebesar 6,2%.<sup>1</sup> Usaha kecil merupakan sektor utama yang mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia, karena usaha berskala kecil dinilai mampu bertahan dalam keadaan krisis ekonomi.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo dalam berita harian Sindo news, perekonomian Indonesia pada tahun 2016, diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 5,2% - 5,6%, peningkatan ini akan terwujud apabila kinerja sector usaha kecil semakin ditingkatkan. Melihat pengaruh usaha

---

<sup>1</sup> Ilyas Istianur Praditya, “*Ekonomi RI: 99% Dominan UMKM, 1% Perusahaan Besar*”, dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/692113/ekonomi-ri-99-dominan-umkm-1-perusahaan-besar>, diakses pada 20 November 2015

kecil yang sangat dominan tersebut, keberadaan usaha kecil pun perlu lebih didukung lagi. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah dengan mendorong lembaga keuangan untuk memberikan bantuan dana kepada pelaku usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk lebih memajukan UMKM sebagai salah satu sektor usaha yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2012 **)		TAHUN 2013 ***)		PERKEMBANGAN TAHUN 2012-2013	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>UNIT USAHA (A+B)</b>	(Unit)	56.539.560		57.900.787		1.361.227	2,41
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	(Unit)	56.534.592	99,99	57.895.721	99,99	1.361.129	2,41
	- Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	55.856.176	98,79	57.189.393	98,77	1.333.217	2,39
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	629.418	1,11	654.222	1,13	24.803	3,94
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	48.997	0,09	52.106	0,09	3.110	6,35
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	(Unit)	4.968	0,01	5.066	0,01	98	1,97
2	<b>TENAGA KERJA (A+B)</b>	(Orang)	110.808.154		117.681.244		6.873.090	6,20
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	(Orang)	107.657.509	97,16	114.144.082	96,99	6.486.573	6,03
	- Usaha Mikro (UMi)	(Orang)	99.859.517	90,12	104.624.466	88,90	4.764.949	4,77
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	4.535.970	4,09	5.570.231	4,73	1.034.262	22,80
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	3.262.023	2,94	3.949.385	3,36	687.363	21,07
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	(Orang)	3.150.645	2,84	3.537.162	3,01	386.517	12,27
3	<b>PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)</b>	(Rp. Milyar)	8.241.864,3		9.014.951,2		773.086,9	9,38
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	(Rp. Milyar)	4.869.568,1	59,08	5.440.007,9	60,34	570.439,8	11,71
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	2.951.120,6	35,81	3.326.564,8	36,90	375.444,2	12,72
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	798.122,2	9,68	876.385,3	9,72	78.263,1	9,81
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	1.120.325,3	13,59	1.237.057,8	13,72	116.732,5	10,42
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	(Rp. Milyar)	3.372.296,1	40,92	3.574.943,3	39,66	202.647,2	6,01
4	<b>PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B)</b>	(Rp. Milyar)	2.525.120,4		2.670.314,8		145.194,4	5,75
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	(Rp. Milyar)	1.451.460,2	57,48	1.536.918,8	57,56	85.458,5	5,89
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	790.825,6	31,32	807.804,50	30,25	16.978,9	2,15
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	294.260,7	11,65	342.579,19	12,83	48.318,5	16,42
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	366.373,9	14,51	386.535,07	14,48	20.161,1	5,50
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	(Rp. Milyar)	1.073.660,1	42,52	1.133.396,05	42,44	59.735,9	5,56

Sumber: Departemen Koperasi, diakses melalui [www.depkop.go.id/data-usaha-mikro-kecil-menengah-dan-usaha-besar-tahun-2012-2013](http://www.depkop.go.id/data-usaha-mikro-kecil-menengah-dan-usaha-besar-tahun-2012-2013)

Tabel 1.1 merupakan laporan pertumbuhan UMKM yang diterbitkan oleh Departemen Koperasi dimana pada tahun 2012-2013 UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 2,41%. Pada unit usaha mikro tingkat pertumbuhannya sebesar 2,39%, sedangkan pada unit usaha kecil pertumbuhannya sebesar 3,94%, dan pada unit usaha menengah pertumbuhannya cukup besar yakni 6,35%. Apabila dibandingkan dengan usaha skala besar UMKM memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih baik.

Berdasarkan data di atas, wajar apabila keberadaan usaha kecil dinilai mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peranan usaha kecil dalam perekonomian di Indonesia yaitu *pertama*, usaha kecil mampu menyerap tenaga kerja atau sekelompok orang guna menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; *kedua*, dengan jumlah usaha kecil yang sangat besar akibatnya banyak masyarakat yang ikut terlibat di dalamnya sehingga pengangguran berkurang dan pendapatan merata; *ketiga*, dengan mengelola sumber daya alam menjadi sebuah produk akan memberikan nilai tambah baik bagi produk itu sendiri maupun bagi produk unggulan yang ada di sebuah daerah; dan yang *keempat* adalah taraf hidup masyarakat di daerah meningkat sebagai akibat tersedianya lapangan pekerjaan.<sup>2</sup>

Namun dengan adanya keterlibatan usaha kecil dalam perekonomian Indonesia yang cukup besar, para pelaku usaha kecil memiliki kendala dalam

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan & Penetrasi Ekonomi Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 35

upaya mengembangkan usahanya. Kendala yang mereka hadapi umumnya terkait permodalan, pemasaran, kurangnya tenaga kerja yang terampil, dan kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi. Masalah terbesar yang dihadapi pelaku usaha kecil sampai saat ini adalah mengenai permodalan. Modal merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting untuk perkembangan usaha kecil, tanpa adanya modal kegiatan produksi suatu usaha tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, pemerintah dituntut terlibat pula dalam mengembangkan usaha kecil dengan melibatkan lembaga keuangan untuk menyediakan bantuan modal usaha. Dengan adanya akses bantuan modal usaha bagi masyarakat secara menyeluruh melalui program pengembangan lembaga keuangan, diharapkan dapat menyalurkan kredit lunak bagi masyarakat desa dan pemerintah daerah untuk mengembangkan kegiatan usaha.<sup>3</sup>

Menurut Braman Setyo selaku Deputy bidang Pembiayaan Kemenkop UKM, menyatakan bahwa pihak Kemenkop UKM pada tahun 2016 akan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp. 100 triliun hingga Rp. 120 triliun dengan suku bunga 9%.<sup>4</sup> Keberpihakan Bank Syariah pada sektor UMKM ditunjukkan pula dengan berbagai strategi pembiayaan oleh masing-masing Bank Syariah secara individu. Dalam hal kredit usaha, Bank Indonesia telah menggaris bawahi bahwa kredit usaha mikro adalah kredit dengan nominal lebih kecil dari

---

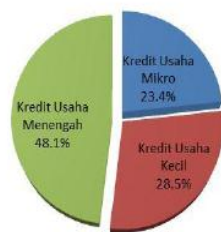
<sup>3</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 196

<sup>4</sup> Lily Rusna Fajriah, "Kemenkop UKM Target Salurkan KUR Rp. 120 Triliun di 2016", dalam <http://ekbis.sindonews.com/read/1074526/34/kemenkop-ukm-target-salurkan-kur-rp120-triliun-di-2016-1451976578>, pada 23 Januari 2016

Rp.50 juta, kredit usaha kecil berkisar antara Rp.50 juta sampai Rp. 500 juta, sedangkan kredit usaha menengah adalah kredit perbankan sebesar Rp.500 juta sampai Rp. 5 miliar.<sup>5</sup>

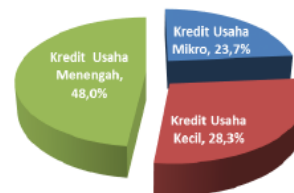
**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Kredit UMKM Tahun 2015 menurut Klasifikasi Usaha**

**Kredit UMKM menurut Klasifikasi Usaha**



**Triwulan I**

**Kredit UMKM Menurut Klasifikasi Usaha**



**Triwulan II**

Sumber: Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/laporan/Pages/Laporan-Perkembangan-Kredit-UMKM-Triwulan-I-II-2015.aspx>

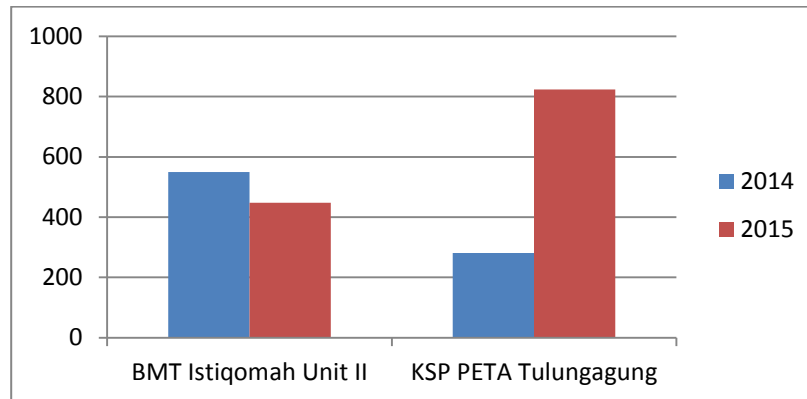
Berdasarkan data dari Bank Indonesia diatas, penyaluran kredit UMKM pada tahun 2015 di Triwulan I sebagian besar disalurkan kepada kredit usaha menengah yaitu sebesar 48,19%, usaha kecil sebesar 28,5%, dan usaha mikro sebesar 23,4%. Sedangkan pada triwulan II, penyaluran kredit pada usaha menengah dan kecil mengalami sedikit penurunan masing-masing sebesar 48,0% dan 28,3%, dan pada usaha mikro mengalami sedikit peningkatan menjadi 23,7%. Penyaluran kredit dari triwulan I ke triwulan II untuk usaha menengah mengalami penurunan sebesar 0.19%, sedangkan pada kredit usaha kecil menurun sebesar 0,2%, dan peningkatan pada usaha mikro dari triwulan I ke triwulan II sebesar 0.3%.

<sup>5</sup> Bustanul Arifin, *Formasi Strategi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 66

Pada umumnya pelaku usaha kecil mengalami kesulitan ketika mengakses permodalan ke perbankan, hal ini dikarenakan adanya prosedur yang sulit, tingginya suku bunga perbankan serta adanya kendala dimana tidak semua usaha kecil memiliki status *bankable*. Sebagai jalan keluarnya, pemerintah mulai mendorong lembaga keuangan mikro untuk ikut serta menyalurkan bantuan dana kepada para pelaku usaha kecil. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang berperan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, serta menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Dalam praktiknya lembaga keuangan mikro dibedakan menjadi dua yakni lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syari'ah seperti BMT atau koperasi syari'ah dan lembaga keuangan mikro konvensional. Salah satu lembaga keuangan mikro syari'ah yang memberikan bantuan modal berupa kredit kepada pelaku usaha kecil adalah BMT Istiqomah Unit II dan KSP PETA Tulungagung. Kedua lembaga ini memberikan bantuan dana bagi pelaku usaha kecil dalam bentuk kerjasama yang disertai bagi hasil, bantuan dana yang disalurkan tersebut berupa kredit konsumtif dan juga kredit produktif. Kredit produktif dari BMT Istiqomah Unit II dan KSP PETA Tulungagung merupakan kredit yang disediakan bagi pelaku usaha dalam bidang perdagangan, pertanian, peternakan, industri, jasa, dan sector lainnya. Sedangkan untuk kredit konsumtif merupakan kredit yang disediakan bagi rumah tangga.

**Gambar 1.2**  
**Penyaluran Pembiayaan BMT Istiqomah Unit II dan KSP PETA**  
**Tulungagung tahun 2014-2015**



Sumber: RAT Diolah, 2015

Berdasarkan gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 BMT Istiqomah Unit II Tulungagung telah menyalurkan pembiayaan sebanyak 550 pembiayaan dan pada tahun 2015 pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan sebanyak 448 pembiayaan. Kemudian pada KSP PETA Tulungagung, pembiayaan yang telah disalurkan pada tahun 2014 sebanyak 281 pembiayaan dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 823 pembiayaan.

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan BMT Istiqomah Unit II Berdasarkan Jenis Usaha**

No.	Jenis Usaha	Jumlah Nasabah		Prosentase (%)	
		2014	2015	2014	2015
1.	Pertanian	83	59	15%	13%
2.	Peternakan	46	42	8%	9%
3.	Perdagangan	47	29	9%	6%
4.	Industri	72	62	13%	14%
5.	Konstruksi	20	28	4%	6%
6.	Jasa	153	120	28%	27%
7.	Konsumsi	89	78	16%	17%
8.	Sektor Lain	40	30	7%	7%
<b>Total</b>		<b>550</b>	<b>448</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: RAT 2015 Diolah

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan produktif pada tahun 2014 dan tahun 2015 di BMT Istiqomah Unit II Tuungagung paling banyak adalah untuk jenis usaha jasa, masing-masing adalah 153 nasabah dan 120 nasabah. Sedangkan pembiayaan yang paling sedikit adalah pada jenis usaha lain, yakni sebanyak 40 pembiayaan di tahun 2014 dan 30 pembiayaan di tahun 2015 atau jika dipersentasekan masing-masing adalah 7% dari total nasabah yang menerima pembiayaan.

Pada lembaga keuangan mikro syari'ah pemberian kredit usaha dalam bentuk pembiayaan kerjasama yang di dalamnya terdapat sistem bagi hasil. Berbeda dengan sistem bunga pada lembaga konvensional, sistem bagi hasil di lembaga keuangan mikro syari'ah ditujukan untuk menghindari adanya riba. Penetapan bagi hasil yang diberlakukan merupakan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam sistem bagi hasil perolehan keuntungan kedua belah pihak tidak akan sama, dikarenakan pembagian keuntungan disesuaikan dengan persentase bagi hasil yang disepakati dengan nominal keuntungan yang disesuaikan dengan pendapatan usaha yang dijalankan. Dengan adanya system bagi hasil pada lembaga keuangan mikro syari'ah dinilai tidak akan memberatkan pelaku usaha kecil, namun justru dianggap mampu mendorong para pelaku usaha kecil untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan dengan mudah.

Tujuan utama lembaga keuangan menyalurkan kredit adalah untuk membantu para pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usahanya berupa



meningkatnya pendapatan dari usaha tersebut. Pendapatan didefinisikan sebagai jumlah uang yang bisa dibelanjakan oleh suatu rumah tangga selama suatu periode tertentu tanpa meningkatkan atau menurunkan asset bersihnya. Pendapatan meliputi segala hal yang meningkatkan kemampuan untuk berbelanja, upah, gaji, dividen, bunga yang diterima, pendapatan perusahaan sendiri, pembayaran tunjangan, sewa, dst.<sup>6</sup> Bagi usaha kecil yang mengalami kesulitan modal, upaya untuk meningkatkan pendapatan sangat sulit, karena biasanya pendapatan yang diperoleh hanya berupa pengembalian modal awal yang digunakan namun keuntungan yang diperoleh sedikit. Oleh karena itu, dengan adanya BMT atau koperasi akan lebih memudahkan pelaku usaha kecil untuk mengakses permodalan dan dengan adanya bantuan modal tersebut akan mampu meningkatkan pendapatan usaha kecil.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Kredit Usaha Mikro terhadap Tingkat Pendapatan Nasabah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Istiqomah Unit II dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PETA Tulungagung Tahun 2015*”.

---

<sup>6</sup> Karl E. Case, Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan Jilid 1*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007) hal, 427

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah mencakup variabel-variabel:

- a) Penyaluran kredit untuk usaha mikro.
- b) Penetapan bagi hasil dalam penyaluran kredit.
- c) Jenis usaha yang diberikan bantuan kredit.
- d) Pendapatan nasabah setelah menerima kredit usaha.

### 2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah nasabah yang menerima kredit usaha mikro di BMT Istiqomah Unit II dan KSP PETA Tulungagung tahun 2015.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah modal mempengaruhi tingkat pendapatan nasabah di BMT Istiqomah Unit II dan KSP PETA Tulungagung ?
2. Apakah bagi hasil mempengaruhi tingkat pendapatan nasabah di BMT Istiqomah Unit II dan KSP PETA Tulungagung?
3. Apakah jenis usaha mempengaruhi tingkat pendapatan nasabah di BMT Istiqomah Unit II dan KSP PETA Tulungagung?

4. Apakah modal, bagi hasil, dan jenis usaha secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pendapatan nasabah di BMT Istiqomah Unit II dan KSP PETA Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh modal terhadap tingkat pendapatan nasabah di BMT Istiqomah Unit II dan KSP PETA Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap tingkat pendapatan nasabah di BMT Istiqomah Unit II dan KSP PETA Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pengaruh jenis usaha terhadap tingkat pendapatan nasabah di BMT Istiqomah Unit II dan KSP PETA Tulungagung.
4. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh modal, bagi hasil, dan jenis usaha terhadap tingkat pendapatan nasabah di BMT Istiqomah Unit II dan KSP PETA Tulungagung.

#### **E. Hipotesa Penelitian**

Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu dianggap benar. Selain itu juga, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan

rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh modal terhadap tingkat pendapatan nasabah.

Ho<sub>1</sub> : Tidak terdapat pengaruh modal terhadap tingkat pendapatan nasabah.

Ha<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh bagi hasil terhadap tingkat pendapatan nasabah.

Ho<sub>2</sub> : Tidak terdapat pengaruh bagi hasil terhadap tingkat pendapatan nasabah.

Ha<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh jenis usaha terhadap tingkat pendapatan nasabah.

Ho<sub>3</sub> : Tidak terdapat pengaruh jenis usaha terhadap tingkat pendapatan nasabah.

Ha<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara modal, bagi hasil, dan jenis usaha terhadap tingkat pendapatan nasabah.

Ho<sub>4</sub> : Tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara modal, bagi hasil, dan jenis usaha terhadap tingkat pendapatan nasabah.

## **F. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan bidang ilmu lembaga keuangan syari'ah serta dapat dijadikan tambahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

### **2. Kegunaan Praktis**

a. Bagi lembaga keuangan, sebagai bahan pertimbangan maupun bahan masukan untuk pengambilan keputusan kedepannya.

- b. Bagi peneliti yang akan datang, untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai pijakan dalam penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif dengan permasalahan yang sama.
- c. Bagi akademik, sebagai bahan perbendaharaan kepustakaan.

## **G. Penegasan Istilah**

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>7</sup> Sedangkan kredit UMKM adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>8</sup>

#### b. Modal

Modal adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, pada perusahaan umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan*, (Jogjakarta: Mitra Pelajar, 2009), hal. 102

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI tahun 2012 pasal 1 nomor

<sup>9</sup> Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan*, hal. 62

c. Bagi hasil

Bagi hasil merupakan pemberian bunga dan hak atas pembagian laba.<sup>10</sup>

d. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan pendapatan per tahun maksimal Rp. 300.000.000 dan kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000 per tahun.<sup>11</sup>

e. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan baik tunai maupun tidak tunai, yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.<sup>12</sup> Pendapatan dapat digolongkan dalam empat macam, yaitu pendapatan sangat tinggi, pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah.

f. Nasabah

Nasabah adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguna produk.<sup>13</sup>

g. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan nonbank yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk saham, simpanan atau deposito, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat

---

<sup>10</sup> Ibid hal. 269

<sup>11</sup> Akmaluddin Suangkupon, *Direktori Produk Kredit dan Tabungan Perbankan: Se-Kalimantan Tengah Tahun 2014*, (Kalimantan Tengah: Unit Akses Keuangan dan UMKM KPwBI Prov. Kalteng, 2014), hal. 8

<sup>12</sup> Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan.....*, hal. 175

<sup>13</sup> Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 143

sebagai modal usaha dengan syarat adanya bagi hasil antara pemodal, peminjam, dan BMT.<sup>14</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual dalam susunan judul yang telah dijabarkan diatas, secara operasional bahwa penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kredit usaha mikro terhadap tingkat pendapatan nasabah di BMT Istiqomah Unit II dan KSP PETA Tulungagung Tahun 2015.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar dapat diperoleh pemahaman yang sistematis, runtut dan jelas serta terarah, maka peneliti memberikan sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal Terdiri dari :

Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

### 2. Bagian Utama (Inti) Terdiri dari :

BAB I Pedahuluan, terdiri dari : (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) hipotesis penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) identifikasi dan batasan masalah, (g) definisi operasional, (h) sistematika skripsi.

---

<sup>14</sup> Azyumardi Azra, *Berderma untuk Semua*, (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, t.t), hal. 236

BAB II Landasan teori, terdiri dari : (a) kerangka teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, (b) kerangka teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, (c) dan seterusnya, (d) hasil penelitian terdahulu, (e) kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) berisi pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta, (e) analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V Pembahasan yang berisi mengenai pembahasan hasil penelitian

BAB VI Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran atas hasil penelitian.

3. Bagian Akhir Terdiri Dari :

Daftar rujukan, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.